

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Konservatisme

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan verifiabilitas yang diminta untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. Watts juga menyatakan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, pajak, dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak – pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah. Selain itu, konservatisme juga menyebabkan *understatement* terhadap laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada *overstatement* terhadap laba pada periode – periode berikutnya, sebagai akibat *understatement* terhadap biaya pada periode tersebut. Bliss (dalam Watts, 2003) memberikan bentuk definisi yang paling ekstrim yaitu tidak mengantisipasi laba tetapi mengantisipasi semua kerugian. Basu (1997) juga menyatakan bahwa akuntansi konservatif sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*). Jadi konservatisme akuntansi intinya adalah menunda pengakuan laba yang belum terealisasi, tetapi mengakui kerugian yang telah menjadi ekspektasi.

2.1.1. Manfaat Konservatisme Akuntansi

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat. Tetapi ada juga pendapat yang menentangnya dan beranggapan bahwa konservatisme akuntansi tidak bermanfaat karena mengandung informasi yang bias.

a. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut. Stabus (1995) dalam Mayangsari dan Wilopo (2002) berpendapat adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan konservatisme merupakan kelemahan konservatisme. Disamping itu, konservatisme dianggap sebagai suatu sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

b. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi

konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (*agency conflict*). Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditor dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly dan Hayn, 2000 dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002). Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidak bergunaan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

2.1.2. Peluang Pemilihan Tingkat Konservatisme Oleh Manajemen

Salah satu pengertian mengenai tingkat konservatisme akuntansi adalah tingkat konservatisme akuntansi yang dipilih oleh manajemen dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Beberapa metode akuntansi dalam PSAK (IAI, 2009) yang memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif antara lain (Widyaningrum, 2008):

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008): Persediaan

Pada paragraf 21 menyatakan biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang

atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Paragraf 23 menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraph 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Metode MPKP atau yang sering disebut dengan FIFO dalam metode penilaian persediaan menghasilkan laba yang lebih besar daripada metode LIFO dan rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*) dalam laporan laba rugi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan metode FIFO menghasilkan biaya persediaan akhir menjadi lebih besar sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih kecil dan laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Oleh karena itu metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan yang paling konservatif. Hal tersebut berlaku jika kondisi perekonomian mengalami inflasi sehingga harga terus meningkat.

Berbeda dengan laporan laba rugi akuntansi, laporan laba rugi fiskal hanya mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO dan rata-rata tertimbang. Diantara kedua metode tersebut, metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif karena menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Widyaningrum, 2008)

2. PSAK No. 17 (1994) tentang akuntansi penyusutan telah diganti oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang asset tetap

Dalam paragraf 65 menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balancing method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu asset. Metode penyusutan asset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut.

Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode penyusutan semakin panjang maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004). Hal tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Diantara metode penyusutan yang disebutkan dalam PSAK tersebut, metode penyusutan saldo menurun lebih konservatif dibanding metode lainnya. Tetapi hal tersebut hanya terjadi pada awal-awal periode penyusutan sedangkan pada saat menuju akhir periode penyusutan metode saldo menurun menjadi tidak konservatif.

3. PSAK No. 19 (Revisi 2000): Aset Tidak Berwujud

Pada paragraf 68 menyatakan bahwa terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aktiva atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi.

Sama halnya dengan penyusutan, jika periode amortisasi semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode amortisasi semakin panjang, maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004). Hal tersebut dikarenakan jika periode amortisasi semakin pendek, maka biaya amortisasi tiap periode menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sama seperti dengan penyusutan pula, diantara metode amortisasi yang disebutkan dalam PSAK, metode amortisasi saldo menurun merupakan metode yang paling konservatif diantara metode lain yang ada. Lebih lanjut, paragraf 69 menyatakan bahwa amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun kadang-kadang manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu asset lain tidak menimbulkan beban. Dalam hal demikian beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok asset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi asset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan dalam nilai tercatat. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraph 69 tersebut adalah bahwa apabila amortisasi suatu asset tidak berwujud diakui sebagai bagian dari harga pokok asset lainnya, hal tersebut dapat membuat laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan menjadi besar atau tidak konservatif. Sebaliknya, jika amortisasi tersebut diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil atau konservatif.

4. PSAK No. 20: Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19: Aktiva tidak Berwujud

Pada paragraf 36 menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau tahap riset pada suatu proyek internal). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset untuk suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pada paragraph 39 menyatakan bahwa suatu aktiva tidak berwujud timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan dari suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan enam kriteria tertentu. Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sedangkan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai aktiva mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih besar dan tidak konservatif.

2.2. Konservatisme Akuntansi dan Implementasi *Corporate Governance*

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen & Meckling, 1976). Untuk meminimalisasi permasalahan agensi tersebut, maka dibuatlah kontrak-kontrak dalam perusahaan baik kontrak antara pemegang saham dengan manajernya maupun kontrak antara manajemen dengan karyawan, pemasok, dan kreditur. Namun, konflik tersebut tidak dapat diatasi secara

menyeluruh dengan menggunakan kontrak tersebut karena biaya untuk membuat kontrak yang lengkap sangatlah mahal, dan apabila tidak merupakan hal yang tidak mungkin (Fama dan Jensen, 1983; Hart, 1995). Jadi, dalam kondisi dimana kontrak tidak dapat dibuat secara sempurna, mekanisme *corporate governance* memainkan peranan dalam memitigasi konflik tersebut. Mekanisme *corporate governance* (seperti *board of directors*, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, pengawasan oleh tenaga kerja, auditor, dan lain-lain) berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat vital. Dalam proses pelaporan keuangan, dewan komisaris membutuhkan informasi yang akurat agar dapat memonitor kinerja manajer secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat diandalkan dalam memonitor dan mengevaluasi manajer serta dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan strategi (Watts dan Zimmerman, 1986; Bushman dan Smith, 2001 dalam Ahmed dan Duellman, 2007). Konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam sistem akuntansi perusahaan yang dapat membantu dewan komisaris dalam mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya (Watts, 2003, 2006 dalam Ahmed dan Duellman, 2007).

Ahmed dan Duellman (2007) menyatakan bahwa *board of directors* yang kuat akan mensyaratkan konservatisme yang lebih tinggi sehingga dapat membantunya dalam mengurangi biaya agensi yang timbul karena adanya informasi yang asimetris antara manajer dengan pihak lain. Sedangkan Ball (2001) yang menyatakan bahwa konservatisme akan memfasilitasi implementasi *corporate governance* melalui perannya sebagai fungsi monitoring terhadap kebijakan investasi perusahaan. Dengan mensyaratkan pengakuan yang lebih cepat atas ekspektasi kerugian, konservatisme membantu manajer untuk mengidentifikasi proyek yang memiliki NPV negatif atau investasi yang memiliki kinerja buruk. Konservatisme juga akan membatasi kerugian yang mungkin muncul dari keputusan investasi yang berkinerja buruk dan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007).

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Berdasarkan pandangan tersebut, maka kekuatan karakteristik dari *board of directors* sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* akan berhubungan secara positif dengan konservatisme akuntansi.

2.3. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi

monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan kriteria tentang komisaris independen sebagai berikut :

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan

(Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000; p. 6).

Komisaris independen yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Wardhani, 2008).

2.4. Kepemilikan Manajerial

Masalah keagenan tidak timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan, sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan (Putri, 2006).

Jensen & Meckling (1976) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Berdasarkan teori agensi klasik, semakin besar kepemilikan oleh *inside directors* (komisaris yang terafiliasi/komisaris diluar komisaris independen) akan mengarahkan pada kesesuaian tujuan antara pihak manajemen dengan pemegang saham.

2.5. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba.

Komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh para peneliti sebagai berikut :

Mayangsari dan Wilopo (2002) menguji hubungan antara konservatisme akuntansi dengan *value relevance* dan *discretionary accruals* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan menemukan bukti bahwa prinsip akuntansi konservatif memiliki *value relevance*. Artinya, dengan menggunakan prinsip konservatisme laporan keuangan yang disajikan dapat menunjukkan nilai pasar perusahaan. Semakin tinggi konservatisme, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi konservatisme maka semakin rendah kemungkinan dilakukannya manajemen laba hal ini menunjukkan bahwa konservatisme dapat mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Sedangkan *discretionary accruals* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai pasar perusahaan, tetapi konservatisme mempunyai pengaruh secara signifikan pada nilai perusahaan.

Selain itu, Widya (2005) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif. Dalam penelitiannya, Widya menggunakan struktur kepemilikan, kos politis, kontrak hutang, dan pertumbuhan sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah konservatisme. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi struktur kepemilikan, besarnya kos politis dan pertumbuhan penjualan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif. Semakin besar konsentrasi struktur kepemilikan perusahaan terhadap modal, serta semakin besar kos politis yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung memilih akuntansi konservatif. Selain itu juga, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif.

Ahmed dan Duellman (2007) menguji mengenai karakteristik dewan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dan menemukan bukti bahwa *inside directors* berhubungan negatif signifikan dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual, sedangkan *outside directors* berhubungan positif. Ukuran dewan yang diukur dengan ukuran akrual menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berhubungan negatif dan tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik dewan terhadap tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dengan obyek penelitian sebanyak 69 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme dengan ukuran akrual, sedangkan kepemilikan manajerial dan independensi komisaris tidak berpengaruh positif, tetapi independensi komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap konservatisme dengan ukuran nilai pasar. Dengan ukuran nilai pasar pula, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi suatu perusahaan.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman, 2007, dan Wardhani, 2008. Penelitian ini menambahkan

satu variabel independen yang berkaitan dengan karakteristik dewan yaitu ukuran dewan komisaris. Penelitian ini juga melengkapi kekurangan penelitian yang dilakukan Wardhani, 2008, yaitu pemilihan sampel yang digunakan Wardhani berkisar dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dimana penerapan *corporate governance* di Indonesia belum efektif, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari tahun 2007 sampai dengan 2009.

Penelitian ini akan meneliti karakteristik dewan perusahaan yang secara spesifik berkaitan dengan independensi dari komisaris, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris. Karakteristik dewan perusahaan tersebut merupakan mekanisme *corporate governance* yang sangat penting yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pelaporan kondisi keuangan perusahaan, terutama yang terkait dengan konservatisme akuntansi.

2.7.1. Independensi Dewan Komisaris dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Dilain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif

monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H1: Independensi dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2.7.2. Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Konservatisme Akuntansi

Dalam konteks konservatisme, kepemilikan oleh *inside directors* dan manajemen ini berperan sebagai fungsi monitoring dalam proses pelaporan keuangan. Apabila *inside directors* dan manajemen menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula.

LaFond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme dalam pelaporan keuangan ini merupakan salah satu mekanisme dalam mengatasi permasalahan agensi ketika timbul pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Mereka menghipotesiskan bahwa dengan semakin kecilnya kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. Konsisten dengan hipotesa tersebut, mereka menemukan adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H2: Kepemilikan manajerial dalam perusahaan berpengaruh secara negatif dengan tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2.7.3. Ukuran Dewan Komisaris dengan Konservatisme Akuntansi

Terdapat dua pandangan yang berbeda di dalam literatur mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris. Pandangan yang pertama bahwa ukuran dewan yang besar kurang efektif daripada ukuran dewan yang kecil karena terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan kelompok yang berjumlah besar. Permasalahan ini didiskusikan oleh Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Ahmed dan Duellman (2007) yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan dan nilai perusahaan. Pandangan yang berbeda dinyatakan oleh Klein (2002) dalam Ahmed dan Duellman (2007) yang menyatakan ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Hal ini membuat fungsi pengawasan menjadi lebih efektif.

Apabila kinerja dewan direksi sesuai dengan kepentingan pemegang saham, maka dalam hal ini akan mensyaratkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga penerapan prinsip konservatisme menjadi salah satu pilihan pihak manajemen perusahaan karena prinsip konservatisme dapat menghasilkan angka-angka laba yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H3: Ukuran dewan komisaris dalam perusahaan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan

